



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BONDET WRAHATNALA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN III
3. NHK : 429666

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/85 m2 di KARANGANYAR,  
HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 172.475.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E CVT/MPNP-MINIBUS Tahun  
2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN A1J31OF GL AT/MPNP-MINIBUS  
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
3. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T SPM Tahun 2015, HASIL  
SENDIRI Rp. 11.475.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 11.180.188

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.094.097

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 566.749.285

**III. HUTANG** Rp. 159.679.207

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 407.070.078

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.